



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**KECAMATAN AMBULU**

**TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesainya penyusunan Perubahan Rencana \strategis SKPD Kecamatan Ambulu Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ambulu Tahun 2016-2021 adalah sebagai implementasi dari Amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ambulu ini berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ Tanggal Agustus 20005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJMD Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ambulu pada hakekatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ambulu ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Karyawan Kantor Kecamatan Ambulu, didalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

CAMAT AMBULU



Drs . SUTARMAN , M.Si  
Pembina Tk. I  
Nip.19650315 198503 1 008

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana strategi Kecamatan Ambulu Tahun 2016-2021 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Ambulu) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Ambulu, maka disusunlah Renstra Kecamatan Ambulu sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Perubahan Renstra Kecamatan Ambulu memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2016-2021.

### 1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Kecamatan Ambulu disusun atas dasar :

- a. Undang – undang Nomor.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- b. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
- c. Undang – undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355 );

- d. Undang – undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355 );
- e. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
- f. Undang - undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undnag – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang;
- g. Undang-undang Nomor.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
- h. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- i. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor. 38.Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jember;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
- r. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud dan Tujuan :**

Perubahan Renstra Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Ambulu selama kurun waktu 2016-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang

berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.

5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika naskah Renstra Kecamatan Ambulu 2016-2021 disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1 Gambaran Umum Kecamatan Ambulu
- 2.2 TUPOKSI
- 2.3 Struktur Organisasi SKPD
- 2.4 Sumberdaya SKPD
- 2.5 Kinerja Pelayanan
- 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ambulu

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Rwnstra SKPD
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan isu isu strategis

BAB IV TUJUAN,SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN

4.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Jangka Menengah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

5.2. Indikator Kinerja

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN  
DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran.
4. Matrik Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Program-Program Rutin.

## BAB II

# GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN SKPD

### 2.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN AMBULU

Kecamatan Ambulu terletak dibagian Selatan Kabupaten Jember yang berbatasan sebelah timur dengan Kecamatan Tempurejo, sebelah utara dengan Kecamatan Jenggawah, sebelah barat dengan Kecamatan Wuluhan dan sebelah selatan dengan Samudra Indonesia.

Ditinjau dari aspek perwilayahan, kondisi topografi di Kecamatan Ambulu sebagai berikut :

1. Wilayah mencakup area seluas 762,43 km<sup>2</sup> dengan ketinggian 600 m dari permukaan laut.
2. Bentuk wilayah terdiri daratan datar dan pegunungan
3. Terbagi menjadi 8 desa yang terdiri Dusun sebanyak 29 buah, Rukun Warga (RW) sebanyak 109 buah, Rukun Tetangga (RT) sebanyak 441 buah.
4. Jumlah penduduk sebanyak 78.924 jiwa, terdiri laki-laki sebanyak 40.173 jiwa dan perempuan sebanyak 38.751 jiwa.

### 2.2 TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor : 61 Tahun 2016 tanggal. 01 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember sebagai berikut :

#### I. Camat.

- (1) Camat mempunyai tugas meliputi :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan diwilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. penanganan konflik sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propinsi daerah;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
- e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan diwilayah kecamatan;

- f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan desa, peraturan kepala desa ;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan, desa pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa ;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa ;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pemukiman kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa , penetapan dan penegasan data desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa ;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan ;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas ;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai ; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **II. SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah , tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan , kepegawaian, keuangan, urusan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya ;
  - b. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan;
  - c. penyelenggaraan urusan tata usaha administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - d. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

### ***A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian***

- (1). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, administrasi Kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan usaha umum dan tata usaha Sekretariat tata naskah Sekretariat tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- c. perbaikan kantor dan bangunan lain yang dikelola oleh kecamatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- e. mengurus dan alat-alat lain yang dikelola oleh kecamatan;

- f. pelaksanaan persiapan upacara , pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan pengaturan tamu;
- g. penyelenggaraan, pelayanan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian serta urusan kepegawaian lainnya;
- h. penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja , disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- i. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- j. pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- k. pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- l. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan
- m. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

### ***B. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan***

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan program perencanaan anggaran Pendapatan dan Belanja kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. :
- (2) Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
  - b. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan adan belanja kecamatan;
  - c. Perencanaan intensifikasi sert ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak;

- d. Perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- e. Penganalisa, pengevaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- g. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- h. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- i. Pengurusan keuangan perjalanan dinas maupun administrasipengelolaan keuangan kecamatan;;
- j. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan;
- k. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. Melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban. Atas pelaksanaan tugas.

### **III. SEKSI PEMERINTAHAN**

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum desa/Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi
  - a. penyusunan program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa;
  - b. Penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan Kecamatan;
  - c. Penyusunan program dan melaksanakan fasilitas kegiatan sosial politik, idiologi dan kesatuan bangsa; dan
  - d. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

### **IV. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- (1) Seksi Ketenrtaman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempnyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
  - c. Penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
  - d. Pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
  - e. Pemantauan situasi , kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
  - f. Pemantauan , pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana diwilayah daerah; dan
  - g. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

## **V. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempnyai tugas
  - a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan , pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
  - b. mengkoodinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, kepemudaan peranan wanita dan olah raga; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kesehetreaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik diwilayah kecamatan;
- c. penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- e. pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga , lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan diwilayah kecamatan;
- g. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama;
- i. penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar , pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan diwilayah kecamatan;
- k. penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga diwilayah kecamatan;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah; dan
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **VI. SEKSI PELAYANAN UMUM**

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan Umum kepada masyarakat diwilayah Kecamatan yang meliputi pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan,kebersihan serta sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang dberikan oleh Camat.
- (2) Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Pelayanan umum mempunyai fungsi :
- a. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. Pemberian fasilitasi dan penertiban rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
  - c. Pemberian fasilitasi pelayanan dibidang perbankan , perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
  - d. Pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industri dan usaha kecil; dan
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

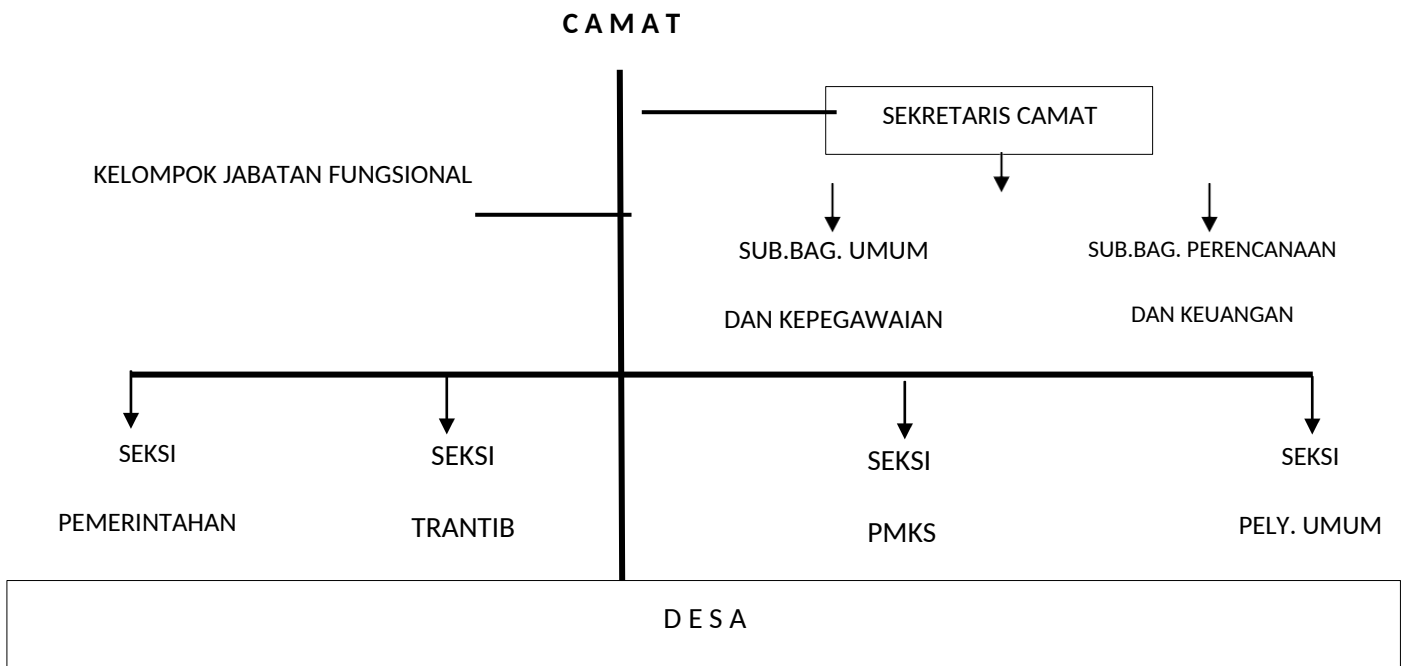
### **2.3. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor. 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupatensebagai berikut :

## Gambar

### Bagan Organisasi Kecamatan

(Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Jember)



Kecamatan Ambulu mempunyai susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pelayanan Umum

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

## **2.4 SUMBERDAYA SKPD**

### **(1) Komposisi Pegawai**

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Ambulu sebanyak : 33 orang yang terdiri dari:

1. Golongan IV : 3 orang
2. Golongan III : 7 orang
3. Golongan II : 13 orang
4. Golongan I : -
5. CPNS  
Golongan II : -  
Golongan I : -
6. K2 : - orang
7. Honorer : 9 orang

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Ambulu yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

1. Camat ( Eselon IIIa ) : 1 orang
2. Sekertaris Camat ( Eselon IIIb ) : 1 orang
3. Kepala Seksi ( Eselon IVa ) : 4 orang
4. Kepala Subbagian ( IVb ) : 2 orang

**Tabel Status Pegawai Kecamatan Ambulu sebagai berikut :**

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS PEGAWAI	JABATAN
1	Drs. SUTARMAN, M.Si	PNS	CAMAT
2	MULYANTONO, ST	PNS	SEKCAM
3	HARI TRIYANTO, SH	PNS	KASI PEM
4	MARKATIN EKO RINI, S.Sos	PNS	KASI PELUM
5	Drs. TOTOK SUWARTO, M.Si	PNS	KASI PMD
6	Drs. MOHAMAD SYAFI'I, M.Si	PNS	KASI TRANTIB
7	SUYANTO, S.Sos	PNS	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	DANIEL ADJIE SOEFYANTO, SH	PNS	Kasubag Keu dan Perencanaan
9	SUWANDI, S.Sos. M.Si	PNS	Pengadministrasi Umum
10	RAODA TAPPU	PNS	Pengadministrasi Umum
11	SETIYA CUWUNG I	PNS	Pengadministrasi Umum
12	TULUS	PNS	Pengadministrasi Umum
13	FERK HARIADI	PNS	Pengadministrasi Umum
14	SAMSURI	PNS	Pengadministrasi Umum
15	FATHAN	PNS	Pengadministrasi Umum
16	MUHAMAD JAIS EFENDI	PNS	Pengadministrasi Umum

17	EKO WIDHI ARTO	PNS	Pengadministrasi Umum
18	NANIK MULYANI	PNS	Pengadministrasi Umum
19	ITA YUNIARSIH	PNS	Pengadministrasi Umum
20	MISYADI	PNS	Polisi Pamong Praja
21	BUKARI	PNS	Polisi Pamong Praja
22	BAMBANG JUNAEDI	PNS	Polisi Pamong Praja
23	SUPRIYADI	PNS	Polisi Pamong Praja
24	EDI SUWIKNO, SH	NON PNS	Banpol PP
25	PRIYO ENGGAR CAHYONO	NON PNS	Banpol PP
26	EDY SUNARYONO	NON PNS	Banpol PP
27	JUNAIDI IRWANTO	NON PNS	Banpol PP
28	AFIK FINDOYO	NON PNS	Banpol PP
39	MOH. ASROFI ALI SYAFAAT	NON PNS	Banpol PP
30	WIWIK DWI HARTININGSIH	NON PNS	Full Timer PKK
31	PUTRI LESTARI	NON PNS	Sukwan
32	AFFIFATUL AINIYAH	NON PNS	Sukwan

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Ambulu menurut status pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel.

Jumlah Pegawai menurut Status, Pangkat dan golongan  
(Per Oktober 2019 )

No.	Status Kepegawaian	Gol/ruang	Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Ambulu							
			Camat	Sekretariat Kecamatan	Sub Bag	Seksi Pem	Seksi PMD & Kesos	Seksi Pel um	Seksi Trant ib	Staf
1	Pegawai negri Sipil									
1.1	Pembina Tk.I	IV.b	1	-	-	-	-	-	-	
1.2	Pembina	IV.a	-	-	-	-	1	-	1	
1.3	Penata Tk I	III.d		1	1	1	-	1	-	2
1.4	Penata	III.c	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	Penata muda Tk. I	III.b	-	-	1	-	-	-	-	
1.6	Penata Muda	III.a	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	Pengatur Tk I	II.d	-	-	-	-	-	-	-	6
1.8	Pengatur	II.c	-	-	-	-	-	-	-	6
1.9	Pengatur Muda Tk I	II.b	-	-	-	-	-	-	-	1
1.10	Pengatur Muda	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	Juru Tkt I	I.d	-	-	-	-	-	-	-	
1.12	Juru	I.c	-	-	-	-	-	-	-	
1.13	Juru Muda Tk I	I.b	-	-	-	-	-	-	-	
1.14	Juru Muda	I.a	-	-	-	-	-	-	-	
2	Banpol PP		-	-	-	-	-	-	-	6
	Ful Timer PKK		-	-	-	-	-	-	-	1
	Sukwan		-	-	-	-	-	-	-	2
	Jumlah		1	1	2	1	1	1	1	24

### 3) Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Ambulu, adalah sebagai berikut :

Pegawai negeri Sipil (PNS) terdapat :

- 3 Orang berpendidikan S-2
- 6 Orang berpendidikan S-1
- 1 Orang berpendidikan D-3
- 22 Orang berpendidikan SMA/ sederajat
- 0 Orang berpendidikan SD/ sederajat

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Ambulu menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel.

Jumlah Pegawai menurut Latar belakang Pendidikan  
(Per Oktober 2019)

No.	Status Kepengawaian	Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Ambulu							
		Camat	Sekcam	Sub Bag	Seksi Pem	Seksi PMD 7 Kesos	Seksi PeU m	Seksi Trantib	Staf
1	Pegawai negeri Sipil								
1.1	Strata-3	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Strata-2	1		-	-	1	-	1	1
1.3	Strata-1	-	1	2	1	-	1	-	
1.4	Diploma 4	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	Diploma-3	-	-	-	-	-	-	-	1
1.6	SMA/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	13
1.7	SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	

1.8	SD/ Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2</b>	<b>Rolstat/Sukwan</b>								
2.1	Strata-1	-	-	-	-	-	-	-	2
2.2	SMA	-	-	-	-	-	-	-	7
2.3	SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	SD/ Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	1	1	2	1	1	1	1	24

### 2.2.2 Perlengkapan

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dikelola oleh Kecamatan Ambulu dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebesar Rp. 1.622.860.217- yang didalamnya mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

#### Daftar Nama Barang dan Harga Barang

No.	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga dan Rupiah
1	Tanah	4.061 M2	205.000.000
2	Bangunan Gedung	7	674.807.817
3	Mobil	2	235.096.000
4	Motor	8	114.270.000
5	Kursi Kerja / Staf	37	14.499.000
6	Kursi Rapat / Plastik	275	22.550.000
7	Kursi Tunggu	5	8.550.000

8	Kursi Sidang	3	2.250.000
9	Kursi Pimpinan	1	1.500.000
10	Meja Kerja	26	8.900.000
11	Meja Tamu	2	1.550.000
12	Meja Pimpinan	1	1.260.000
13	Meja Kerja Pejabat	1	1.900.000
14	Meja Rapat	7	1.550.000
15	Meja Panjang	2	9.900.000
16	Meja Pimpong	1	1.000.000
17	Karpet	4	3.925.000
18	Kipas Angin	12	6.080.000
19	Air Conditioner	5	32.700.000
20	Tabung Gas	1	300.000
21	Sound System	3	21.767.500
22	Lambang Korpri / Garuda	2	530.000
23	Gambar Presiden/Wakil	7	310.000
24	Televisi	6	4/750.000
25	Komputer	8	56.928.500
26	Laptop/Notebook	5	52.000.000
27	Printer	6	20.173.000
28	Pengeras Suara	1	3.000.000
30	Pesawat Telepon	1	300.000
31	Pesawat SSB	1	3.000.000
32	Faximile	1	2.500.000

33	Kamera Digital	2	10.500.000
34	Proyektor	1	12.900.000
35	Modem dan Anthene Penuat	1	2.477.000
36	Mesin Ketik	1	1.400.000
37	Almari Kayu	11	9.800.000
38	Almari Besi	5	15.780.000
39	Rak Buku	2	3.000.000
40	Filling Kabinet	4	4.750.000
41	Peta Kecamatan	1	150.000
42	Genset	2	19.900.000
43	Brankas	2	10.890.000
44	Papan Data/Struktur	4	3.567.000
45	Sketsel	1	500.000
46	Gorden	1	7.450.000
47	Podium	1	3.000.000
48	Mesin jahit	1	2.000.000
49	Mesin Obras	1	1.950.000

## 2.5 Kinerja Pelayanan

### 2.5.1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambulu Tahun 2011 -2015

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Ambulu yang mempunyai tugas-tugas dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya

memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan.

Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Kecamatan Ambulu telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target indikator sasaran strategis Kecamatan Ambulu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran strategis Kecamatan Ambulu Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2011 – 2015 Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Prosentase terciptanya transportasi yang layak bagi masyarakat	100 %	100 %	100 %
2.	Prosentase kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang berhasil dibina	100 %	100 %	100 %
3.	Prosentase peran serta masyarakat menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan	100 %	100 %	100 %
4.	Prosentase sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %
5.	Prosentase sarana dan prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %
6.	Prosentase tingkat disiplin aparatur	100 %	100 %	100 %
7.	Prosentase disiplin aparatur Pemerintah Desa dalam managemen Pemerintah Desa	100 %	100 %	100 %
8.	Prosentase Sarana e-KTP demi tercapainya tertib tertib administrasi kependudukan dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %
9	Prosentase peran serta masyarakat aktif dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	100 %	100 %	100 %

## 2.5.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambulu Keadaan Sekarang

Kinerja Kantor Kecamatan Ambulu tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Sasaran tersebut antara lain :

1. Kelancaran kegiatan kantor
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
4. Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Desa dan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat
6. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan
7. Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Kecamatan

Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Ambulu menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 12 ( Dua belas ) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2016 – 2021		% PENCAPAIAN TARGET
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Prosentase Kecamatan Ambulu yang menjalankan pelayanan publik bernilai B survey Kepuasan Masyarakat ( SKM)	100%	100%	100 %

Dari 12 ( Dua belas ) indikator tersebut nampak bahwa 12 (Dua belas) indikator berhasil mencapai 100 %.

### 2.5.3. Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang

1. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musranbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musranbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapan dari kami dinas instansi tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kecamatan Ambulu dikarenakan penyampaian informasi kurang , sehingga banyak masyarakat yang memang belum tahu tentang perda tersebut.Diharapkan untuk yang akan datang dan selanjutnya dari Dinas yang terkait dan bekerjasama dengan Kecamatan apabila ada perubahan atau peraturan baru hendaknya diadakan sosialisasi yang menghadirkan masyarakat dan instansi sektoral di tingkat Kecamatan.
3. Masyarakat kurang proaktif dengan Aparat yang ada di Wilayah dalam menginformasikan kejadian - kejadian yang ada di Lingkungan Masyarakat,sehingga masih ada kejadian atau huru – hara dilingkungan yang tidak terselesaikan dan mengganggu ketentraman dan keamanan dilingkungan.diharapkan kedepan dari Aparat yang membidangi Kamtibmas ditingkatkan pemantauan keliling dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat di wilayah.
4. Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa belum difungsikan sesuai tupoksinya, sehingga masih banyaknya Permintaan Laporan Kegiatan dari Kabupaten,Kecamatan ataupun Instansi Sektoral yang terlambat. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Pentingnya kordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan di Desa.

## **2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ambulu**

### *1. Kondisi Internal*

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Desa
- Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor . 61 Tahun 2016
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Ambulu yang baik
- Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Ambulu
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Ambulu

### *2. Kondisi Eksternal*

- Banyak kegiatan di semua bidang dan kegiatan diluar bidang di Desa yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Ambulu sehingga perlu adanya penambahan karyawan
- Instansi Sektoral yang terkait kurang proaktif /kurang koordinasinya sehingga apabila ada kegiatan yang berhubungan dengan data tidak sesuai dengan data yang ada di kecamatan.
- Sebagian besar Masyarakat menginginkan pelayan yang dikecamatan bisa selesai cepat waktu namun Kecamatan masih terkendala dengan lamanya proses dari Kabupaten ( Dispendum).
- Kurangnya Pemahaman tentang Tupoksi aparatur sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.
- Wilayah Kecamatan Ambulu terletak di Desa dan berpenduduk banyak baik dari kalangan Petani maupun pedagang dan Karyawan sehingga perlu adanya pemantauan secara instensip / kerja sama dalam hal kenyamanan, keamanan serta ketertipan lingkungan.

Prediksi keadaan Kecamatan Ambulu 5 ( lima ) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. *Faktor Internal*

a. Kekuatan :

- Tersedianya SDM yang memadai
- Adanya struktur organisasi yang terpola
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati Kepada Camat
- Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Ambulu yang baik
- Kecamatan Ambulu terletak diwilayah Pedesaan dan berpenduduk banyak.
- Di sektor Pertanian Kecamatan Ambulu mempunyai potensi usaha Pangan

b. Kelemahan

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Desa
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas.

2. *Faktor Eksternal*

a. Opportunities ( peluang )

- Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan
- Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Desa
- Perlu adanya sosialisasi Perda sebagai bekal untuk Pemahaman dan pengembangan SDM yang berkembang di wilayah lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program Kamtibmas.
- Usaha Pertanian merupakan andalan yang cukup baik untuk terus dikembangkan guna menunjang otonomi daerah. Diharapkan dengan adanya kerja sama pihak ketiga maka dapat menambah Kesejahteraan masyarakat Ambulu.

b. Threats ( ancaman )

- Masih rendahnya SDM Perangkat Desa
- Kurang maksimalnya hasil kegiatan pemberdayaan dan peningkatan parsipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Ambulu
- Kurang optimalnya pengembangan usaha Pertanian .

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
  - a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas kordinasi di wilayah KecamatanAmbulu.
  - b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - c. Pembinaan dan Sosialisasi tentang Perda dan menjamin kepastian hukum.
  - d. Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sektor Pertanian
2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :
  - a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan.
  - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
  - c. Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
  - a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Desa
  - b. Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam Penegakan Perda dan Kantibmas

- c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
  - d. Pemda bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk lebih bisa mengembangkan sektor Pertanian.
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
- a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
  - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas

## **B A B III**

### **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor ; 61 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Jember.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ambulu**

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ambulu, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Ambulu yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Desa serta stakeholders yang ada sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintahan yang bisa menjadi sumber atau akar masalah pembangunan. Dalam hal ini, kita menyadari bahwa dalam struktur budaya yang masih paternalistik, peran pemerintah sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Peran pemerintah berfungsi secara mendasar sebagai penggerak dan pengarah masyarakat. Sering terjadi persoalan pembangunan justru karena pemerintah daerah tidak menyadari fungsinya atau pelaksanaan fungsinya kurang optimal;
2. Pembangunan yang tidak fokus pada penyelesaian masalah, partisipasi, dan dukungan masyarakat yang rendah terjadinya banyak pelanggaran hukum di kalangan birokrasi pemerintahan, pemborosan penggunaan anggaran, merupakan bentuk-bentuk dari rendahnya derajat kehadiran pemerintah dalam proses pembangunan di masyarakat;
3. Masih kurangnya diakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

4. Kurang optimalnya aparat kependudukan dalam implementasi pelayanan prima dalam penerbitan dokumen kependudukan;
5. Sistem pengarsipan data dan dokumen kependudukan masih belum aman dan belum optimal;
6. Masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil (waktu prosedur, dan biaya);
7. Pemutakhiran data penduduk masih terkendala sistem komunikasi datanya;
8. Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia;
9. Kurangnya penggerakan dan *sinergisme* kelembangaan dan jaringan pengarusutamaan gender;
10. Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak;
11. Kurang optimalnya sosialisasi program KB dan KS;
12. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana KB dan KS;
13. Pentingnya memobilisasi posyandu dan kekuatan masyarakat lainnya untuk kegiatan KB dan KS;
14. Kurangnya sinergi penanganan PMKS dari seluruh komponen di masyarakat;
15. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal/daerah;
16. Masih kurangnya peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan;
17. Wadah inovasi dan kreativitas para pemuda belum dikembangkan secara optimal;
18. Nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan masih belum optimal dipahami oleh masyarakat;
19. Budaya siskamling di masyarakat telah pudar;
20. Kelembagaan desa dinilai belum siap dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
21. Kelembagaan Kecamatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

22. Peran kecamatan dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan belum optimal;
23. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and cleangovernment*) belum optimal ;
24. Pelayanan informasi publik masih belum optimal;
25. Pelaksanaan *reward and punishment* dalam pembinaan pegawai masih belum optimal;
26. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih belum optimal;
27. Banyaknya kasus masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
28. Belum berkembangnya Badan Usaha Milik Desa;
29. Belum *terupdatenya* secara rutin profil desa;

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran system yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang tersebut. Pernyataan visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

Visi Bupati Kabupaten Jember untuk Lima Tahun Kedepan yaitu

**“JEMBER BERSATU MENUJU MASYARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI ”**

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi inteoretasi Visi. Misi

merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja.

Visi Bupati Jember ini jabarkan kedalam tiga misi, yaitu :

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tersebut di atas dijabarkan ke dalam 22 janji kerja, yaitu :

1. Sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK
2. Memberikan 5000 beasiswa Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi
3. Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah/Madrasah dan Pondok Pesantren serta memperkuat jaringan Masjid dan Pondok Pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan public
4. Meningkatkan sebesar 3 kali lipat honor guru mengaji dan meningkatkan bantuan untuk guru PAUD
5. Menjadikan Jember sebagai pusat embarkasi Haji wilayah Timur Indonesia
6. Memberikan asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan melakukan pengaspalan jalan hingga ke pelosok, membangun dan memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi
8. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisional dan menata Pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka
9. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM dan Koperasi

10. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian
11. Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sector ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau
12. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir antara lain dengan memberikan asuransi kerja untuk para nelayan
13. Memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua dan melakukan operasi gratis bagi Dhuafa
14. Membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan pusat layanan kesehatan yang mendekat ke masyarakat, antara lain : merevitalisasi Puskesmas, Menyediakan 3 dokter di setiap puskesmas dan ambulans di setiap desa
15. Membangun layanan usaha dan layanan public satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja
16. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun system anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer dan PNS
17. Memperkuat kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain melalui program satu desa satu dosen, mencairkan dana desa secara tepat waktu dan menyegerakan pelaksanaan UU Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
18. Meningkatkan bantuan/honor Ketua RT dan RW
19. Mengembangkan industri kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama
20. Merintis dan mengembangkan bandara Jember menjadi bandara komersial
21. Mengembangkan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman public

22. Menjadikan Jember sebagai Bumi Shalawat yang ramah lingkungan, ramah warga berkebutuhan khusus, ramah ibu dan anak serta ramah Kelompok Minoritas.

### **3.3 Telahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi , fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan , arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kabupaten Jember pada tahap pertama RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Jember antara lain , Kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk Jember Maju Iptek dan Imtak, Jember Mandiri, Jember Sehat, Jember Kuat dan Bersih, Jember Kota Wisata dan Berbudaya

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Jember yaitu :

- a. Peningkatan dan Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
- b. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
- c. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan
- e. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM
- f. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
- g. Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan yang lestari dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir

- h. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik
- i. Pembangunan kedaulatan pangan melalui penyediaan pangkalan, penyediaan pupuk tepat waktu dan optimalisasi lahan pertanian
- j. Pengembangan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman – taman publik

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **A. TELAAHAN RT RW**

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan Ambulu termasuk kedalam **Sistim Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Permukiman Desa, Pertanian, Agropolitan, Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar Desa dan pendukung aktifitas wisata.**

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan

untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

## **B. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

1. Sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK.
2. Memberikan 5.000 beasiswa Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi.
3. Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah/Madrasah dan Pondok Pesantren serta memperkuat jaringan Masjid dan Pondok Pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik.
4. Meningkatkan sebesar 3 kali lipat honor guru mengaji dan meningkatkan bantuan untuk guru PAUD.
5. Memberikan asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji.

### **JEMBER MANDIRI**

6. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan melakukan pengaspalan jalan hingga ke pelosok, membangun dan memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi.
7. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisional dan menata Pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.
8. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan Koperasi.
9. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian.

10. Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau.
11. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir antara lain dengan memberikan asuransi kerja untuk para nelayan.

### **JEMBER SEHAT**

12. Memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua dan melakukan operasi gratis bagi Duafa.
13. Membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan pusat layanan kesehatan yang mendekati ke masyarakat, antara lain :
  - Merevitalisasi Puskesmas :
  - Menyediakan 3 dokter di setiap Puskesmas
  - Ambulans di setiap Desa

### **JEMBER KUAT DAN BERSIH**

14. Membangun layanan usaha dan layanan publik satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja.
15. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer dan PNS.
16. Memperkuat kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain melalui program satu desa satu dosen, mencairkan dana desa secara tepat waktu dan menyegerakan pelaksanaan UU Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
17. Meningkatkan bantuan/honor Ketua RT dan RW.

### **JEMBER KOTA WISATA BERBUDAYA**

18. Mengembangkan industri kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama.
19. Mengembangkan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman publik.
20. Menjadikan Jember sebagai Bumi Shalawat yang ramah lingkungan, ramah warga kebutuhan khusus, ramah Ibu dan anak serta ramah Kelompok Minoritas.

### **Isu Strategis Lainnya**

Adapun isu strategis lainnya di Kabupaten Jember antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, termasuk juga bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus;
- b. Peningkatan kualitas akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin (kaum duafa);
- c. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih dalam rangka meningkatkan kinerja sektor pemerintahan;
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat diarahkan agar masyarakat yang berpendapatan rendah bisa meningkat penghasilannya sesuai dengan status pekerjaan dan usahanya;
- e. Penguatan Daya saing Koperasi Usaha mikro, kecil menengah (KUMKM) mengingat UMKM merupakan kekuatan ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dan sebagai lahan penyerapan tenaga kerja;
- f. Peningkatan kualitas dan daya saing calon tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru dan masuk kerja formal serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang produktif dan kondusif;
- g. Peningkatan kuantitas, kualitas dan akses pariwisata secara terpadu meliputi wisata alam, buatan, religi dan kebudayaan sehingga memperbanyak kunjungan dan lama kunjungan wisata;

- h. Pembangunan Infrastruktur fisik dan pranata sosial dalam rangka mewujudkan lingkungan yang layak huni dan nyaman bagi warga kota;
- i. Peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat sebagai dasar pembangunan moral dan spiritual individu, serta menjamin terjadinya harmonisasi kehidupan antar umat beragama;
- j. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup;
- k. Pengelolaan agroindustri harus menjadi fokus perhatian Pemerintah dalam upaya membangun dan mengembangkan kawasan agroindustri;
- l. Perdagangan menjadi salah satu fokus perhatian yang tidak kalah pentingnya. Perdagangan yang terdapat di Kabupaten Jember mampu ditingkatkan daripada saat ini ketika sarana, prasarana serta fasilitasi dukungan pemerintah tersedia;  
Infrastruktur
  - Perlunya peningkatan dan penambahan panjang jalan antar desa dan kecamatan;
  - Mendukung percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan Jember;
  - Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Jember;
  - Pengembangan sanitasi komunal di lingkungan perumahan;
  - Penyediaan air minum sehat untuk umum di fasilitas-fasilitas umum;
  - Penghijauan DAS untuk menahan erosi dan meningkatkan debit sumber air

m. Pengangguran

Isu strategis terkait pengangguran di Jember masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius. Di antaranya, upah pekerja yang masih rendah, jaminan/ perlindungan sosial tenaga kerja, dan skill/keahlian tenaga kerja yang masih minim.

Selain masalah di atas, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang moderen dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industri akan dititikberatkan pada :

- industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah lebih;
- industri padat karya;
- industri padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

n. Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kecamatan Ambulu merupakan salah satu penghasil padi dan palawija di Kabupaten Jember. Secara umum Kabupaten Jember sudah mampu mewujudkan sebagai daerah berswasembada pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat sesuai sumber daya dan budaya dengan metode ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil serta rakyat miskin rawan pangan.

o. Kemiskinan

Program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ambulu dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ambulu**

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember merupakan bagian OPD yang berperan dalam penuntasan Misi I yaitu “Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan Tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik” dan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan kelembagaan desa

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kantor Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.

## BAB V.

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

## **BAB VI**



### **INDIKATOR KINERJA KECAMATAN AMBULU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**TABEL 4.1**  
**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa /Kelurahan dalam upaya meningkatkan Pelayananana Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	85	85	85	85	85	Oreintasi Pelayanan Publik Berbasis Kepuasan Masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayananana Umum
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan ,Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100	100	100	100	100	Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintah dan Masyarakat	Membangun koordinasi antar Penyelenggara n Pemerintahan dan Masyarakat	Program Koordinasi Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan , Ketertiban dan keamanan, Pemerdayaan Masyarakat dan Kessos
				Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100			


  
**CAMAT AMBULU**  
  
**Drs. SUTARMAN, M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 196503115 198503 1 008

**TABEL 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN**

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Kode rek. Program	Program dan kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi			
									2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah	
									Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah					
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	4.01.35.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		%tingkat peningkatan kualitas pelayanan kepada masy.	100%											1.531.132.000		KEC. AMBULU				
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pendukungoperasional kantor kecamatan		23%	135.000.000	14%	80.900.000	15%	84.000.000	15%	88.600.000	16%	95.000.000	16%	95.000.000	100%	578.500.000	Subag Umum dan Kepegawaian		
					Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan		Persentase penyediaan honor pengelola keuangan, barang dan jasa kebutuhan penunjang administrasi dan operasional rutin kantor	12 bl	12 bl	148.316.000	12 bl	148.316.000	12 bl	165.000.000	12 bl	165.000.000	12 bl	165.000.000	12 bl	165.000.000	72 bl	952.632.000	Subag Umum dan Kepegawaian		
				4.01.35.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana yang			100.100.000		84.800.000		83.000.000		183.000.000		83.000.000		83.000.000		596.700.000			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Jabatan		% Terawatnya Rumah Dinas Camat	0%	0%	-	100%	4.500.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	40.500.000	Subag Keu dan Perenc.	
				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		% Terawatnya Gedung Kantor dan bangunan Lain	0%	0%	-	100%	10.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	82.000.000	Subag Keu dan Perenc.	
				Pemeliharaan rutin / berkala Mobil Jabatan		Terawatnya Mobil Dinas Jabatan	1 Mobil	1 mbl	31.400.000	1 mbl	31.400.000	1 mbl	35.000.000	1 mbl	35.000.000	1 mbl	35.000.000	1 mbl	35.000.000	1 mbl	35.000.000	1 mbl	202.800.000	Subag Umum dan Kepegawaian	
				Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Terawatnya Kendaraan Operasional/ Dinas	2 kend	2 kend	18.700.000	2 kend	18.700.000	2 kend	26.000.000	2 kend	26.000.000	2 kend	26.000.000	2 kend	26.000.000	2 kend	26.000.000	2 kend	141.400.000	Subag Umum dan Kepegawaian	
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor		Terehabnya Gedung Kantor	1 Pkt	1 Pkt	50.000.000	-	-	-	-	1 Pkt	50.000.000	-	-	-	-	-	-	2 Pkt	150.000.000	Seksi PMKS	
				4.01.35.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Prosentase Terlaksananya Peringatan Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun 2019					36.300.000		25.020.000		25.020.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		176.340.000	


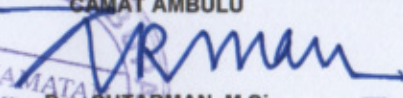
	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya Pakaian Olah Raga	28 stel	28 stel	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 stel	17.500.000	Umum dan Kepegawaian
	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Terlaksananya Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus	1 kali	1 kali	18.800.000	1 kali	25.020.000	1 kali	25.020.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	6 kali	158.840.000	Seksi Trantib
4.01.35.32	Program Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase koordinasi dan movev tingkat kecamatan							170.435.000		177.600.000		177.600.000		177.600.000		703.235.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Rakorcam dan Sosialisasi	-	-	-	-	-	8 kali	30.300.000	8 kali	30.300.000	8 kali	30.300.000	8 kali	30.300.000	32 kali	121.200.000	Seksi Pemerintahan
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Musrenbang dan Pelatihan Kader PKK	-	-	-	-	-	6 kali	27.835.000	6 kali	35.000.000	6 kali	35.000.000	6 kali	35.000.000	24 kali	132.835.000	Seksi PMKS
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Terbayarnya Honor, uang Lembur Bapol PP dan Pemb. Linmas	-	-	-	-	-	12 Bl	112.300.000	12 Bl	112.300.000	12 Bl	112.300.000	12 Bl	112.300.000	48 Bl	449.200.000	Seksi Trantib
4.01.35.33	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan		-	-	-	-	-	12 Bl	52.700.000	12 Bl	52.700.000	12 Bl	52.700.000	12 Bl	52.700.000	48 Bl	210.800.000	
	Koordinasi Pelayanan Umum	Persentase terwujudnya pelaksanaan umum di Kecamatan	-	-	-	-	-	12 Bl	52.700.000	12 Bl	52.700.000	12 Bl	52.700.000	12 Bl	52.700.000	48 Bl	210.800.000	Seksi Pelayanan Umum
1.03.41.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				300.000.000												300.000.000	
	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan di Desa	6 Pkt	6 Pkt	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Pkt	300.000.000	Seksi PMKS
1.11.41.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				30.000.000		30.000.000										60.000.000	
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	peningkatan peran serta lembaga yang berbasis gender	12 Bln	12 Bln	30.000.000	12 Bln	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24 Bl	60.000.000	Seksi PMKS
1.10.41.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan				10.000.000		10.000.000										20.000.000	
	Implementasi sisten Administrasi kependudukan (membangun	Terwujudnya Pelaksanaan e-KTP	12 Bln	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24 Bl	20.000.000	Seksi Yanmum



**TABEL 5.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**PROGRAM-PROGRAM RUTIN**

NO	KODE REK	PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi							
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target			Rupiah						
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah										
1	4.01.35.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%tingkat peningkatan kualitas pelayanan kepada masy.	100%		281.316.000		227.216.000		249.000.000		253.600.000		260.000.000		260.000.000		1.531.132.000		KEC. AMBULU						
		13 a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pendukungoperasional kantor kecamatan		23%	135.000.000		14%	80.900.000		15%	84.000.000		15%	88.600.000		16%	95.000.000		16%	95.000.000	100%	578.500.000	Subag Umum dan Kepegawain	
		13 b	% penyediaan honor pengelola keuangan, barang dan jasa kebutuhan penunjang administrasi dan operasional rutin kantor	Persentase penyediaan honor pengelola keuangan, barang dan jasa kebutuhan penunjang administrasi dan operasional rutin kantor	12 bl	12 bl	146.316.000		12 bl	146.316.000		12 bl	165.000.000		12 bl	165.000.000		12 bl	165.000.000		12 bl	165.000.000	72 bl	952.632.000	Subag Umum dan Kepegawain	
2	4.01.35.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana yang			100.100.000		64.600.000		83.000.000		183.000.000		83.000.000		83.000.000		596.700.000								
		21 a	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah dinas.	% Terawatnya Rumah Dinas Camat	0%	0%	-		100%	4.500.000		100%	9.000.000		100%	9.000.000		100%	9.000.000		100%	9.000.000	100%	40.500.000	Subag Keu dan Perenc.	
		22 b	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	% Terawatnya Gedung Kantor dan bangunan Lain	0%	0%	-		100%	10.000.000		100%	13.000.000		100%	13.000.000		100%	13.000.000		100%	13.000.000	100%	62.000.000	Subag Keu dan Perenc.	
		23 c	Pemeliharaan rutin / berkala Mobil Jabatan	Terawatnya Mobil Dinas Jabatan	1 Mobil	1 mbl	31.400.000		1 mbl	31.400.000		1 mbl	35.000.000		1 mbl	35.000.000		1 mbl	35.000.000		1 mbl	35.000.000	1 mbl	202.800.000	Subag Umum dan Kepegawain	
		24 d	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terawatnya Kendaraan Operasional/ Dinas	2 kend	2 kend	18.700.000		2 kend	18.700.000		2 kend	26.000.000		2 kend	26.000.000		2 kend	26.000.000		2 kend	26.000.000	2 kend	141.400.000	Subag Umum dan Kepegawain	
		42 e	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terehabnya Gedung Kantor	1 Pkt	1 Pkt	50.000.000		-	-		-	-		1 Pkt	50.000.000		-	-		-	-	2 Pkt	150.000.000	Seksi PMKS	
3	4.01.35.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Terlaksananya Peringatan Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun 2019			36.300.000		25.020.000		25.020.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		176.340.000								
		03 a	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya Pakaian Olah Raga	28 stel	28 stel	17.500.000		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	28 stel	17.500.000	Subag Umum dan Kepegawain	
		05 b	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Terlaksananya Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus	1 kali	1 kali	18.800.000		1 kali	25.020.000		1 kali	25.020.000		1 kali	30.000.000		1 kali	30.000.000		1 kali	30.000.000	6 kali	158.840.000	Seksi Trantib	
4	4.01.35.32	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase koordinasi dan monev tingkat kecamatan							170.435.000		177.600.000		177.600.000		177.600.000		703.235.000								
		01 a	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Rakorcam dan Sosialisasi	-	-	-		-	-		8 kali	30.300.000		8 kali	30.300.000		8 kali	30.300.000		8 kali	30.300.000	32 kali	121.200.000	Seksi Pemerintahan	
		02 b	Koordinasi	Terlaksananya	-	-	-		-	-		6 kali	27.835.000		6 kali	35.000.000		6 kali	35.000.000		6 kali	35.000.000	24 kali	132.835.000	Seksi PMKS	

			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Musrenbang dan Pelatihan Kader PKK																		
		03	c	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Terbayarnya Honor, uang Lembur Banpol PP dan Pemb. Linmas	-	-	-	-	-	12 Bl	112.300.000	12 Bl	112.300.000	12 Bl	112.300.000	12 Bl	112.300.000	48 Bl	448.200.000	Seksi Trantib	
5	4.01.35.33			Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan		-	-	-	-	-	12 Bl	52.700.000	12 Bl	52.700.000	12 Bl	52.700.000	12 Bl	52.700.000	48 Bl	210.800.000		
		01	a	Koordinasi Pelayanan Umum	Persentase terwujudnya pelaksanaan umum di Kecamatan	-	-	-	-	-	12 Bl	52.700.000	12 Bl	52.700.000	12 Bl	52.700.000	12 Bl	52.700.000	48 Bl	210.800.000	Seksi Pelayanan Umum	
6	1.03.41.15			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				300.000.000												300.000.000		
		03	a	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan di Desa	6 Pkt	6 Pkt	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Pkt	300.000.000	Seksi PMKS
7	1.11.41.16			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				30.000.000	30.000.000												60.000.000	
		05	a	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	peningkatan peran serta lembaga yang berbasis gender	12 Bln	12 Bln	30.000.000	12 Bln	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 Bl	60.000.000	Seksi PMKS
8	1.10.41.15			Program Penataan Administrasi Kependudukan				10.000.000	10.000.000												20.000.000	
		03	a	Implementasi sistem Administrasi kependudukan (membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Terwujudnya Pelaksanaan e-KTP	12 Bln	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 Bl	20.000.000	Seksi Yanmum
9	1.19.41.19			Program Pemberdayaan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan Keamanan				110.400.000	110.400.000												220.800.000	
		01	a	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Terbayarnya Honor dan uang Lembur Banpol PP	12 Bln	12 Bln	110.400.000	12 Bln	110.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 Bl	220.800.000	Seksi Trantib
10	1.06.41.21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah				2.450.000	4.700.000												7.150.000	
		01	a	Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Tertaksanya Musrenbang Tk. Kecamatan	1 kali	1 kali	2.450.000	1 kali	4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kali	7.150.000	Seksi PMKS
11				Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan									2.900.000					2.900.000			5.800.000	
			a	Penyuluhan Peningkatan disiplin PKL dan Asongan	Tertaksananya Penyuluhan PKL	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	2.900.000	-	-	-	1 kali	2.900.000	2 kali	5.800.000	Seksi Trantib


  
**CAMAT AMBULU**  
  
**Drs. SUTARMAN, M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 198503115 198503 1 008